

Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Etik Winarni*, Rahmi Handayani, Ahmad Soleh

Universitas Muhammadiyah Jambi

*Correspondence email: etik.winarni@umjambi.ac.id, rahmi.handayani@umjambi.ac.id, ahmad.soleh@umjambi.ac.id

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia (IPM); hubungan kinerja keuangan daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jambi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif yang bersifat *ekplanatory* dengan pendekatan *library research*, penelitian ini menggunakan data sekunder dalam periode 2010-2019. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari laporan realisasi APBD Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi serta instansi dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Alat analisis data yang digunakan untuk menjawab kinerja keuangan daerah adalah model analisis derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian daerah, efektifitas PAD dan efisiensi PAD dan untuk melihat pengaruh dan hubungan kinerja keuangan terhadap indeks pembangunan manusia digunakan model regresi berganda (*multiple regression*) dan model korelasi *person*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori rendah hal ini ditunjukkan dari tingkat DDF dengan kriteria cukup, KKD dengan kriteria sangat tinggi, KMD dengan kriteria sangat kurang, dan Keserasian Belanja dalam kriteria cukup. Selanjutnya Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD dan efisiensi PAD Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi. serta kemandirian keuangan daerah, keserasian belanja langsung dan derajat desentralisasi fiskal berhubungan kuat dengan IPM sementara Kemandirian daerah berhubungan lemah dengan IPM.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract. This study analyzed the financial performance conditions of the region and human development indexes (HDI); relationship of regional financial performance to the human development index (HDI) of Jambi Province. The data analysis method used in this study is a descriptive, quantitative, and qualitative method that is *ecplanatory* with a *library research* approach, this study uses secondary data in the period 2010-2019. The data source in the research was obtained from the realization report of the JambiVinnsi Provincial ApBD and the Central Statistics Agency (BPS) of Jambi Province as well as other agencies and literature relevant to this research. The data analysis tools used to answer regional financial performance are models of analysis of fiscal decentralization degrees, regional financial dependence, regional independence, PAD effectiveness and PAD efficiency and to look at the influence and relationship of financial performance on human development indexes used *multiple regression* models and *person* correlation models. The results showed that the financial performance of the Jambi Provincial Government was included in the low category, this was indicated from the DDF level with sufficient criteria, KKD with very high criteria, KMD with very lack of criteria, and Shopping Compatibility in sufficient criteria. Furthermore, the ratio of fiscal decentralization degrees and direct spending compatibility has a positive and significant effect on provincial HDI, while on the ratio of regional financial dependence, pad effectiveness and efficiency of PAD Jambi Province has no significant effect on HDI in Jambi Province. as well as regional financial independence, direct spending compatibility and degrees of fiscal decentralization are strongly related to HDI while regional independence is weakly related to HDI.

Keywords: Regional Financial Performance, Human Development Index

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah diberi mandat berupa tugas-tugas yang harus dijalankan. Salah satu tugas utama pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undang tentang pemerintah daerah Nomor 32/2004 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cara pengelolaan keuangan daerah dengan baik untuk membiayai pembangunan tersebut. (Sari dan Supadmi, 2016)

Tinggi atau rendah kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), karena baik tidaknya kinerja keuangan daerah

sering dijadikan acuan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang termasuk didalamnya indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan data BPS (2020) terjadi kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jambi dari 65,39 pada tahun 2010 menjadi 68,89 pada tahun 2015 dan 71,26 pada tahun 2019. Peningkatan tersebut tentu tidak serta merta terjadi melainkan adanya dukungan sarana dan prasarana pemerintah. Atas dasar analisa tersebut maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk menganalisa hubungan kinerja keuangan daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM). (Sasana, 2012)

Tinjauan pustaka

Pembangunan manusia

Pembangunan manusia adalah perluasan pilihan bagi manusia (*enlarging the choices of people*) dengan manusia sebagai fokusnya (Qasim, 2013). Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik dan nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia serta jender. Pembangunan manusia memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif dari semua sektor (BPS, 2020). Berbagai konsep yang dibahas dalam pembangunan manusia seperti : konsep dan ukuran pembangunan manusia, dimensi global pembangunan manusia, partisipasi penduduk, dimensi baru dari keamanan manusia, jender pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan masih banyak lagi. Sementara menurut Firdausy (1998), ada empat komponen utama dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu: pemerataan dan kesetaraan (*equity*), berkelanjutan (*sustainability*), produktivitas (*productivity*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Sementara menurut BPS (2020), IPM adalah indeks komposit, yang hanya mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yang dianggap memiliki nilai strategis. Ketiga dimensi itu adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Pemilihan dimensi itu sejalan dengan definisi pembangunan manusia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. IPM digunakan untuk merefleksikan sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya melalui upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Tabel 1

Kategori dan Sub Kategori Indeks Pembangunan Manusia Menurut Skala Internasional			
No.	Kategori	Sub kategori	Angka IPM
1	Tinggi	Tinggi	80,00 - 100
2	Menengah	Menengah Atas	66,00 – 79,99
		Menengah Bawah	50,00 – 65,99
3	Rendah	Rendah	0 – 49,99

Sumber: data olahan

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mirza (2012) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Badrudin dan Khasanah (2011) menyatakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ukuran Kinerja Keuangan Daerah

Mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah, yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD dan Rasio Keserasian Belanja Langsung. (Williantara dan Budiasih (2016); Zebua dan Adib (2014); Azzahra, Prihanto, Amzar, (2016)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *library research*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan APBD dan literature serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2010-2019. Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu menganalisis gambaran dan kinerja keuangan daerah (Latrini, 2019) dapat digunakan formulasi sebagai berikut :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

$$\text{Rasio DDF} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian DDF: 0,00 - 10,00 = Sangat Kurang; 10,01 - 20,00 = Kurang; 20,01 - 30,00 = Sedang; 30,01 - 40,00 = Cukup; 40,01 - 50,00 = Baik; >50,00 = Sangat Baik

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD)

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian RKKD: 0,00 - 10,00 = Sangat Kurang; 10,01 - 20,00 = Kurang; 20,01 - 30,00 = Sedang; 30,01 - 40,00 = Cukup; 40,01 - 50,00 = Baik; >50,00 = Sangat Baik

3. Rasio Kemandirian Daerah (RKD)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian RKKD: 0,00 - 10,00 = Sangat Kurang; 10,01 - 20,00 = Kurang; 20,01 - 30,00 = Sedang; 30,01 - 40,00 = Cukup; 40,01 - 50,00 = Baik; > 50,00 = Sangat Baik

4. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Pendapatn PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Potensi Rill

Kriteria Penilaian Efektivitas PAD: Diatas 100 % = Sangat Efektif; 90% - 100% = Efektif; 80% - 90% = Cukup Efektif; 60% - 80% = Kurang Efektif; Kurang 60% = Tidak Efektif

5. Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Efisiensi PAD: > 40 = Tidak Efisien; 31 - 40 = Kurang Efisien; 21 - 30 = Cukup Efisien; 10 - 20 = Efisien; < 10 = Sangat Efisien

Untuk menjawab permasalahan kedua, untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap IPM Provinsi Jambi, digunakan Analisis Regresi Berganda sebagai berikut : (Juanda dkk, 2012)

$$Y = \beta_0 + \beta_1\text{DDF} + \beta_2\text{KKD} + \beta_3\text{KMD} + \beta_4\text{EFK PAD} + \beta_5\text{EFS PAD} + e$$

Dimana : Y = IPM; β_0 = Konstanta; DDF = Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal; KKD = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah; KMD = Rasio Kemandirian Daerah; EFK PAD = Rasio Efektivitas PAD; EFS PAD = Rasio Efisiensi PAD; e = Error

Hasil

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 2

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jambi

Tahun	Realisasi PAD	Total Pend Daerah	DDF	Kriteria
2014	789.329.000.000	10.489.324.000.000	7.53	Cukup
2015	1.241.234.000.000	10.786.086.000.000	11.51	Cukup
2016	1.192.291.000.000	12.484.210.000.000	9.55	Cukup
2017	1.580.533.000.000	12.903.741.000.000	12.25	Cukup
2018	1.656.569.000.000	13.470.772.000.000	12.30	Cukup
2019	1.651.090.000.000	14.515.718.000.000	11.37	Cukup
2020	1.665.326.000.000	14.900.085.000.000	11.18	Cukup
	Rata-Rata		10,81	Cukup

Sumber: data olahan

Rasio derajat desentralisasi fiskal yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,51 persen. Sementara desentralisasi fiskal terendah terjadi tahun 2014 yaitu sebesar 7,53 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di provinsi jambi selama tahun penelitian masuk pada kriteria cukup.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 3
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

Tahun	Pend Transfer	Total Pend Daerah	KKD	Kriteria
2014	8264805000000	10.489.324.000.000	78.79	Sangat Tinggi
2015	7887236000000	10.786.086.000.000	73.12	Sangat Tinggi
2016	10073233000000	12.484.210.000.000	80.69	Sangat Tinggi
2017	9645462000000	12.903.741.000.000	74.75	Sangat Tinggi
2018	9827193000000	13.470.772.000.000	72.95	Sangat Tinggi
2019	10517454000000	14.515.718.000.000	72.46	Sangat Tinggi
2020	10401686000000	14.900.085.000.000	69.81	Sangat Tinggi
	Rata-Rata		74,65	

Sumber: data olahan

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah provinsi jambi terhadap pemerintah pusat masih pada kriteria sangat tinggi. Ini artinya belanja daerah dan pendapatan daerah dari provinsi jambi masih mengandalkan dari bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Kedepan, Provinsi Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan PADnya untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerahnya. Semakin rendah tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer menunjukkan tingginya kemampuan penghasilan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 4
Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Jambi

Tahun	Realisasi PAD	Dana Perimbangan	KMD	Kriteria
2014	789.329.000.000	1.514.518.000.000	52.12	Sangat Kurang
2015	1.241.234.000.000	1.419.080.000.000	87.47	Sangat Kurang
2016	1.192.291.000.000	1.398.290.000.000	85.27	Sangat Kurang
2017	1.580.533.000.000	2.723.261.000.000	58.04	Sangat Kurang
2018	1.656.569.000.000	2.745.222.000.000	60.34	Sangat Kurang
2019	1.651.090.000.000	2.896.754.000.000	57.00	Sangat Kurang
2020	1.665.326.000.000	3.013.902.000.000	55.25	Sangat Kurang
	Rata-Rata		58,99	

Sumber: data olahan

Rasio kemandirian daerah Provinsi Jambi tahun 2014-2020 terlihat dari hasil perhitungan realisasi PAD terhadap dana perimbangan rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 87,47 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa rasio kemandirian dalam kriteria *Sangat kurang*, dan rasio kemandirian daerah yang terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 52,12 persen, bahwa kemandirian daerah dalam kriteria *Sangat Kurang*. Sementara jika dilihat secara Rata-rata rasio tingkat kemandirian daerah Provinsi Jambi adalah sebesar 58,99 persen sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah *Sangat Kurang*.

Keseserasian Belanja langsung

Tabel 5
Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Langsung Provinsi Jambi

Tahun	Total Belanja	Total Belanja	KBL	Kriteria
2014	3.679.159.000.000	1.721.517.000.000	46.79	Cukup Serasi
2015	3.604.245.000.000	1.663.175.000.000	46.14	Cukup Serasi
2016	3.381.884.000.000	1.645.157.000.000	48.65	Cukup Serasi
2017	4.583.486.000.000	1.792.260.000.000	39.10	Kurang Serasi
2018	4.869.536.000.000	1.792.260.000.000	36.81	Kurang Serasi
2019	5.244.690.000.000	1.890.534.000.000	36.05	Kurang Serasi
2020	5.244.690.000.000	2.266.941.000.000	43.22	Cukup Serasi
	Rata-Rata		42,39	

Sumber: data olahan

Rasio keserasian belanja langsung yang terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 36,81 persen dalam kriteria *Kurang serasi* terhadap total belanja. Sedangkan rata-rata rasio belanja langsung terhadap total belanja

Provinsi Jambi terbesar adalah sebesar 48,65 persen pada tahun 2016. Dalam arti kriteria *Cukup serasi* terhadap total belanja daerah Provinsi Jambi.

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 6
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jambi.

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	EFK PAD	Kriteria
2014	789.329.000.000	511.886.511.025	154,2	Sangat efektif
2015	1.241.234.000.000	962.719.305.049	128,93	Sangat efektif
2016	1.192.291.000.000	791.483.669.676	150,64	Sangat efektif
2017	1.580.533.000.000	1.030.401.590.716	153,39	Sangat efektif
2018	1.656.569.000.000	1.254.026.495.079	132,1	Sangat efektif
2019	1.651.090.000.000	1.400.772.036.990	117,87	Sangat efektif
2020	1.665.326.000.000	1.571.210.491.556	105,99	Sangat efektif
	Rata-Rata		134,73	

Sumber: data olahan

Rasio efektivitas PAD Provinsi Jambi terlihat rasio efektivitas PAD mengalami peningkatan. Rasio efektivitas PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 154,2 persen dari anggaran yang ditetapkan, Rasio efektivitas PAD yang terendah terjadi pada tahun 2020 dimana pemerintah mampu mencapai 105,99 persen, itupun sudah termasuk kriteria *Sangat efektif* karena melebihi dari 100 persen.

Rasio Efisiensi PAD

Tabel.7
Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Provinsi Jambi

Tahun	Biaya Pungut PAD	Realisasi PAD	EFS PAD	Kriteria
2014	21.390.815.900	789.329.000.000	2,71	Sangat efisien
2015	35.002.798.800	1.241.234.000.000	2,82	Sangat efisien
2016	30.880.336.900	1.192.291.000.000	2,59	Sangat efisien
2017	39.197.218.400	1.580.533.000.000	2,48	Sangat efisien
2018	40.088.969.800	1.656.569.000.000	2,42	Sangat efisien
2019	39.626.160.000	1.651.090.000.000	2,4	Sangat efisien
2020	41.633.150.000	1.665.326.000.000	2,50	Sangat efisien
	Rata-Rata		2,56	

Sumber: data olahan

Pemerintah Provinsi Jambi dari segi efektivitas realisasi PAD sudah efektif melebihi dari target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil dan dari efisiensi biaya pemerolehan PAD sudah sangat efisien. Artinya pemerintah Provinsi Jambi dalam memperhitungkan alokasi fiskal yang digunakan untuk pembangunan dan aktivitas pemerintahan daerah telah cermat dalam mengkalkulasi kapasitas fiskal daerah, serta prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus membaik.

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi

Tabel 8
Perkembangan Komponen Pembentukan IPM Provinsi Jambi

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	IPM
2014	70,5	97,77	7,92	68,24
2015	70,61	97,84	7,96	68,89
2016	70,66	98,01	8,07	69,62
2017	70,71	98,09	8,15	69,99
2018	70,89	98,09	8,23	70,81
2019	71,04	99,95	8,45	71,26
2020	71,17	99,92	8,55	71,29
Rata2	70,79	97,92	8,19	70,02

Sumber: data olahan

Tabel 8 rata-rata indeks pembangunan manusia selama periode tahun 2014-2019 sebesar 70,02 persen dari angka tersebut menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi masih rendah. Adapun indeks pembangunan manusia tersebut dibentuk oleh angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan

peningkatan daya beli masyarakat yang setiap tahun juga mengalami kenaikan. Untuk lebih meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Jambi, peran program-program pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan indikator pembentukan IPM sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia tidak bisa diabaikan, dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi modal dasar dalam mendukung peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 9
Hasil Pengolahan Korelasi antara IPM dan Kinerja Keuangan Daerah.

		IPM	DDF	KMD	KBL	KKD
IPM	Pearson Correlation	1	.647	-.347	-.712	-.676
	Sig. (2-tailed)		.116	.446	.073	.095
	N	7	7	7	7	7
DDF	Pearson Correlation	.647	1	.049	-.688	-.707
	Sig. (2-tailed)	.116		.918	.087	.076
	N	7	7	7	7	7
KMD	Pearson Correlation	-.347	.049	1	.545	.316
	Sig. (2-tailed)	.446	.918		.206	.490
	N	7	7	7	7	7
KBL	Pearson Correlation	-.712	-.688	.545	1	.596
	Sig. (2-tailed)	.073	.087	.206		.158
	N	7	7	7	7	7
KKD	Pearson Correlation	-.676	-.707	.316	.596	1
	Sig. (2-tailed)	.095	.076	.490	.158	
	N	7	7	7	7	7

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 9 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan DDF sebesar 0,116 > 0,10, yang berarti terdapat korelasi yang tidak signifikan antara variabel IPM dan DDF.
2. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan KMD sebesar 0,446 > 0,10, yang berarti terdapat korelasi yang tidak signifikan antara variabel IPM dan KMD.
3. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan KBL sebesar 0,073 < 0,10, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel IPM dan KBL.
4. Nilai Sig.(2-tailed) antara IPM dan KKD sebesar 0,095 < 0,10, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel IPM dan KKD.

Berdasarkan nilai r hitung (Pearson Correlations) di ketahui bahwa:

1. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan DDF adalah sebesar 0,647 > r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi antara variabel IPM dan DDF. Nilai korelasi sebesar 0,647 artinya terdapat hubungan yang kuat antara DDF dan IPM.
2. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan KMD adalah sebesar -0,347 < r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara variabel IPM dan DMD. Nilai korelasi sebesar -0,347 antara IPM dengan KMD artinya terdapat hubungan yang lemah dan negatif.
3. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan KBL adalah sebesar -0,712 < r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi negatif antara variabel IPM dan DBL. Nilai korelasi sebesar -0,712 antara IPM dan KBL artinya terdapat hubungan negatif yang kuat antara IPM dan KBL.
4. Nilai r hitung untuk hubungan IPM dan KKD adalah sebesar -0,676 < r tabel 0,567, maka disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi negatif antara variabel IPM dan KBL. Nilai korelasi sebesar -0,676 antara IPM dan KKD artinya terdapat hubungan mnegatif yang kuat antara IPM dan KBL

Simpulan

Hasil penelitian yang telah diuraikan maka di peroleh beberapa temuan daam penelitian ini diantaranya adalah: (1) kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori rendah hal ini ditunjukkan dari tingkat DDF dengan kriteria cukup, KKD dengan kriteria sangat tinggi, KMD dengan kriteria sangat kurang, dan Keserasian Belanja dalam kriteria cukup; (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi; dan (3) KKD, KBL dan DDF berhubungan kuat dengan IPM sementara KMD berhubungan lemah dengan IPM.

Daftar Pustaka

- Sasana, H. 2012. Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
- Badrudin, R., & Khasanah, M. 2011. Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, 9(1).
- Qasim, A. W. 2013. United Nations Development Programme (UNDP). Human Development Report 2013. *Pakistan Development Review*, 52(1), 95-96.
- BPS. 2020. Statistik Indonesia.
- Firdausy, C. 1998. *Dimensi manusia dalam pembangunan berkelanjutan*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2).
- Latrini, M. Y., 2019. Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2).
- Williantara, G., & Budiasih, I. G. A. N. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070.
- Zebua, W. F., & Adib, N. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupatendan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409-2438.
- Azzahra, F., Prihanto, P. H., & Amzar, Y. V. (2016). Analisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 5(2).
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. IPB Press. Bogor.